



Pemkot Majukan Pembahasan APBD

YOGYA, TRIBUN - Pada tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memajukan semua tata kala pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pemkot menargetkan pada akhir Oktober sudah disahkan. Target pengesahan ini maju satu bulan dari jadwal sebelumnya.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengatakan, jadwal pembahasan yang dimajukan ini untuk menghindari kesalahan yang terjadi tahun lalu. Tahun lalu, pembahasan APBD molor sehingga tidak ada Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Tak hanya pembahasan APBD murni yang

maju sebulan dari jadwal, tetapi juga pembahasan APBD Perubahan 2015 juga bakal maju. Kami sepakat dengan Dewan untuk bisa menetapkan anggaran perubahan pada minggu kedua September," kata Titik, Selasa (9/6).

Saat ini, ujar Titik, proses pembahasan anggaran sudah masuk tahapan awal yaitu pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014. Ia pun optimis LKPJ sudah bisa ditetapkan pada akhir Juli mendatang.

Sementara untuk LKPJ tahun 2015 masih dibahas penjadwalannya oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Yogyakarta. Jika penjadwalan sudah ditentukan, maka

pembahasan LKPJ 2015 sudah mulai bisa dilakukan. Namun sayangnya, terjadi kendala dengan adanya salah paham antara TAPD dengan DPRD Kota Yogyakarta.

Kesalahpahaman ini terjadi karena beda pengertian mengenai nilai Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) tahun 2015. Berdasarkan penghitungan TAPD, Silpa tahun ini mencapai Rp434 miliar. Tetapi dari anggaran tersebut, TAPD dan Badan Anggaran telah memasukkan ke APBD murni tahun 2015 sebesar Rp365 miliar. Sisanya masih berada di rekening badan layanan umum daerah (BLUD).

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keua-

ngan Daerah (DPDPK), Kadri Renggono, menjelaskan, sisa Silpa tersebut merupakan uang rakyat. Sehingga harus dimasukkan ke rekening BLUD seperti RS Jogja, Taman Pintar, dan Puskesmas yang merupakan layanan dasar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, Ali Fahmi menegaskan, pihaknya hanya meminta kejelasan terkait Silpa ini. Hal tersebut perlu dipastikan karena merupakan dasar untuk pembahasan APBD murni 2015 dan perubahan tahun ini.

"Pembahasan anggaran diusahakan segera dimulai agar pekerjaan yang tertunda tahun lalu bisa dilanjutkan di tahun ini," ujar Fahmi. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005